

Bloembergen, Marieke & Eickhoff, Martijn. (2020). *The Politics of Heritage in Indonesia: A Cultural History*. Cambridge: Cambridge University Press. xiv+323. Online ISBN: 9781108614757. Harga: \$ 81.57 (*hardcover*).

### Grace Leksana

*grace.leksana.fis@um.ac.id*

Universitas Negeri Malang, Indonesia

**Permalink/DOI:** 10.17977/um020v15i12021p195

*Accepted: 5<sup>th</sup> May 2021*

*Published: 30<sup>th</sup> June 2021*

Candi Singosari adalah salah satu situs peninggalan dari Kerajaan Singosari di Jawa Timur. Warisan kerajaan klasik inilah yang mendorong saya dan keluarga untuk mengunjunginya pada 2012. Lalu pada 2017, kami berkesempatan mengunjungi museum Volkenkunde di Leiden, Belanda. Menariknya, objek yang pertama menyambut kami di sayap koleksi Indonesia adalah beberapa arca dari candi Singosari, seperti arca Ganesha, Bhairava, dan Durga yang sedang melawan iblis. Saat itu kami bertanya-tanya, bagaimana objek-objek ini hadir di museum di Belanda, sedangkan situs candi dimana arca-arca ini berasal terletak di Jawa Timur. Jadi siapa yang sebenarnya berhak memiliki objek-objek peninggalan ini? Ketika itu kami menduga hal ini ada kaitannya dengan penjajahan Belanda, tetapi kami tidak yakin bagaimana prosesnya. Tiga tahun setelah itu, saya akhirnya memahami apa yang terjadi dengan objek-objek Candi Singosari melalui buku luar biasa yang ditulis oleh Marieke Bloembergen dan Martijn Eickhoff – *The Politics of Heritage in Indonesia: A Cultural History*.

Jawaban atas kebingungan kami tentang Candi Singosari muncul di bab 1 buku tersebut. Nicolaus Engelhard, seorang Gubernur Jawa, mengunjungi Candi Singosari pada 1804 lalu mengambil enam arca besar dari dalam Candi untuk ditempatkan di kebun rumah peristirahatannya, *De Vrijheid*, di Semarang. Sekitar 1810an, tiga arca tersebut tiba di Belanda. Perjalanan arca-arca Singosari mencerminkan pendekatan utama dari buku tersebut, yaitu “pendekatan mobilitas dari sejarah kultural politik arkeologi dan pembentukan warisan di Asia, melalui berbagai kasus di masa kolonial dan pasca kolonial Indonesia” (hal. 3). Kedua pengarang melihat warisan atau peninggalan masa lalu (*heritage*) sebagai fenomena multi situs yang melibatkan (namun tidak terbatas pada) kepentingan negara dan lembaga pengurus peninggalan masa lalu, sekaligus berbagai individu dan kelompok di tingkat lokal, para elit, turis, artis, akademisi, penjelajah, termasuk perspektif arkeologi yang berpusat pada negara, asosiasi kultural transnasional, dan juga politik global. Bagi pengarang, pendekatan ini mampu memperlihatkan variasi dan hirarki yang dinamis dari ‘warisan atau peninggalan masa lalu’, bagaimana warisan tersebut diartikan, sekaligus mengeksklusi sekelompok orang dalam waktu tertentu.

Menariknya lagi, Bloembergen & Eickhoff juga menekankan bahwa budaya juga politis, sehingga keterkaitan antara warisan dan kekerasan, serta dimensi politik dan agama dalam pembentukan warisan menjadi hal yang penting. Menurut pengarang, pembentukan warisan (*heritage formation*) muncul ketika orang-orang secara sadar mulai mengaitkan 'peninggalan masa lalu' sebagai sesuatu yang berharga untuk dilestarikan hingga masa mendatang (hal 4). Dan untuk mempertahankan klaim atas masa lalu ini, kekerasan seringkali menjadi salah satu mekanismenya.

Melalui situs-situs peninggalan yang terkenal dan ikonik di Indonesia, para pengarang mengembangkan argument mereka tentang pembentukan warisan dan kekerasan. Kasus Candi Singosari mengilustrasikan konstruksi warisan, tetapi sekaligus kebisuan tentang masa lalu kolonial yang penuh kekerasan. Baik museum Volkenkunde di Leiden maupun Candi Singosari di Jawa Timur, tidak memperlihatkan ingatan kolonial dalam pameran mereka. Kedua situs ini menghilangkan kekerasan dan keterhubungannya dengan debat-debat pasca kolonial di masa kini.

Di saat yang bersamaan, warisan-warisan ikonik tersebut tidak hanya membisukan kekerasan, tapi mereka juga digunakan untuk melegitimasi rezim yang dibangun setelah perang dan kekerasan. Dalam buku teks sejarah Indonesia saat ini, Majapahit, kerajaan terakhir Hindu-Budha di Jawa Timur, ditampilkan sebagai prototipe negara Indonesia yang agung dan bersatu. Konstruksi ini telah muncul sejak jaman kolonial, di mana Maclaine Pont, seorang arsitek yang mendapat pendidikan Belanda, bersama dengan Kromodjojo, seorang bupati Mojokerto, mempelajari peninggalan Kerajaan Majapahit di Trowulan (Bab 4). Kolaborasi mereka melahirkan sebuah deskripsi perencanaan kota dengan gaya yang diwarnai oleh kesatuan dan modernitas. Pont kemudian menyampaikan sebuah panggilan kepada pemerintahan colonial "untuk mengambil alih peran konsolidasi dan pemersatu yang sebelumnya dimainkan oleh raja terakhir Majapahit" (hal. 140).

Konstruksi inilah yang kemudian diteruskan oleh para figur nasionalis di awal masa Kemerdekaan. Misalnya saja Muhammad Yamin yang memvisualisasikan dan menulis biografi Gajah Mada pada 1945. Bukunya didasarkan pada penemuan sebuah kepala terakota yang diduga sebagai Gajah Mada dan berbagi sumber tertulis tentang penemuan tersebut. Lagipula, sebuah negara yang baru merdeka memerlukan sentuhan imajinasi tentang keagungan masa pra-kolonialnya. Imajinasi yang sama juga dipertahankan dan direinterpretasikan oleh kesatuan militer Jawa Timur, setelah operasi berdarah anti komunis di 1965. Epilog buku Bloembergen & Eickhoff memperlihatkan bagaimana militer menyatukan kisah keagungan kerajaan abad ke-13 tersebut dengan rezim Orde Baru pada 1966-1998 dengan membangun Pendopo Agung di depan Museum Majapahit di Trowulan. Pendopo ini berfungsi sebagai pengingat kepada para pengunjung tentang kekuatan militer dan legitimasi rezim yang baru berdiri. Singkatnya, kasus Majapahit menunjukkan kontinuitas legitimasi kekerasan di bawah negara yang berubah.

Kebisuan dan legitimasi bukanlah satu-satunya interseksi antara warisan dan kekerasan. Kedua pengarang juga mendiskusikan bagaimana pembentukan warisan juga memicu marginalisasi komunitas Tionghoa Indonesia dalam historiografi Indonesia. Misalnya saja, penemuan guci Cina yang diduga dibawa melalui jalur perdagangan dari negeri Cina ke Halmahera pada abad ke 15, menjadi milik Museum Batavia pada 1937

melalui tangan Orsoy de Flines, seorang kolektor dan pejabat museum (Bab 6). Ketika museum tersebut berubah menjadi museum Pusat Jakarta, keramik-keramik Cina tersebut hanya dikategorikan sebagai keramik asing yang ditemukan di tanah Indonesia. Koleksi tersebut tampaknya hanya berfungsi sebagai penghubung berbagai kebudayaan arkeologis historis yang berbeda-beda yang ditemukan di tanah air, namun sekaligus mengabaikan keterkaitan antara jaringan perdagangan Tionghoa, migrasi, dan menetapnya masyarakat Tionghoa di Indonesia (hal. 230).

Kasus lainnya yang menunjukkan interseksi antara warisan dan kekerasan dipresentasikan melalui kisah Masjid Agung Demak (Bab 2). Dalam kasus ini, pembentukan warisan dimaksudkan untuk mencegah aksi kekerasan lanjutan. Lebih tepatnya, untuk menghindari protes dari komunitas Islam terhadap pemerintah colonial jika masjid mereka runtuh. Pencegahan terhadap pemberontakan menjadi kepentingan negara, sehingga rekonstruksi Masjid Agung, bersama dengan kelompok-kelompok lokal di Jawa dan Madura menjadi proyek rekonstruksi warisan pertama yang dilakukan oleh pemerintah kolonial pada 1800an.

Bagi saya, hal yang paling menarik adalah argumen dan *standpoint* pengarang yang muncul di setiap babnya. Pembentukan warisan (*heritage formation*) tidaklah melulu tentang negara, karena ada banyak sekali aktor yang terlibat di dalam dan di luar suatu negara. Misalnya saja kunjungan Raja Culalongkorn dari Siam ke Borobudur pada 1896, dimana ia menerima hadiah empat patung Budha dari pemerintah kolonial. Borobudur, bagi raja, menjadi elemen penting dari produksi pengetahuan peradaban Budhis dan simbol kejayaan Siam, sebagai bagian jaringan inter-Asia. Contoh lainnya adalah situs Majapahit. Meskipun pemerintah colonial memulai penemuan dan preservasinya, para elit lokal dan penjaga (*caretakers*) juga berperan dalam eksplorasi dan konstruksi narasi tentang Majapahit. Di sisi lain, para elit tersebut menggunakan pengetahuan arekologinya untuk melegitimasi posisi mereka, misalnya klaim seorang bupati sebagai keturunan raja terakhir Majapahit.

Argumen penting dari kedua pengarang ini merupakan sebuah panggilan bagi para akademisi dan praktisi warisan untuk keluar dari dikotomi negara versus rakyat, dan mulai berpikir kritis tentang interaksi, perubahan, dan re-interpretasi di balik pembentukan warisan. Argument non-dikotomis inilah yang membedakan pendekatan kedua pengarang dengan pendekatan dekolonial seperti Farish Noor (lihat poin tentang perdebatan ini dalam kasus Raffles di halaman 35). Terakhir, buku ini memberikan banyak ide dan pemahaman baru tentang pembentukan warisan, sekaligus memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang harapannya bisa kita jawab bersama.